

# kiprah agroforestri



World Agroforestry Centre  
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

ICRAF  
Indonesia

Volume 1 no. 2 - November 2008

## Agroforestri Jati Gunung Kidul

### *Peluang dan Tantangan*

“Karena suplai kayu jati dari perkebunan besar atau hutan pemerintah tidak lagi sebanyak dulu, industri mebel mulai mencari tambahan suplai jati dari hutan rakyat,” papar Philip Manalu dari Center for International Forestry Research (CIFOR). “Fenomena seperti ini merupakan kesempatan emas karena dapat membuka peluang bagi petani jati untuk meningkatkan taraf hidup mereka.”

Potensi agroforestri jati di Jawa memang sangat besar. Dengan luas hamparan sekitar 1,5 kali luas perkebunan jati berskala besar, tingginya permintaan, dan harga yang relatif bagus, peluang ini semestinya dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan petani kecil, termasuk kemiskinan.

“Setidaknya ada tiga syarat bila tujuan tersebut hendak dicapai, yaitu memperbaiki teknik budidaya agroforestri jati, menciptakan skema pembiayaan usahatani di tingkat petani, dan memperbaiki akses pasar – termasuk di dalamnya mengurangi halangan regulasi,” jelas James Roshetko, peneliti senior World Agroforestry Centre (ICRAF)/Winrock International yang akrab disapa Pak Jim.

Ketiga hal yang diungkap Pak Jim itulah yang ingin dijawab dalam penelitian ACIAR Teak Project yang dilaksanakan di tujuh kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, atas dukungan dari Lembaga Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR).

Sejak pertengahan 2007 lalu, para peneliti dan fasilitator lapangan dari CIFOR, ICRAF, Winrock International, Balitbang Kehutanan, Intercafé Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Pokja Hutan Lestari Kabupaten Gunung Kidul bersama-sama dengan para petani jati melaksanakan penelitian yang direncanakan hingga tahun 2011.

Gerhard Manurung, peneliti ICRAF yang mengomandani penelitian budidaya jati mengemukakan bahwa secara umum petani Gunung Kidul masih perlu mengintensifkan penerapan teknik-teknik budidaya jati sehingga produktifitas dan kualitas kayu menjadi optimal.

### daftar isi

- 1 Agroforestri Jati Gunung Kidul: Peluang dan Tantangan
- 2 Berubah..Kenapa Tidak? Satu Aspek dalam penelitian Aksi
- 4 Tebang Jati Bayar Semesteran
- 5 FALLOW: Model Simulasi Dinamika Proses Perubahan Bentang Lahan
- 5 Forum Reboan: Ajang Diskusi dan Silaturahmi di Departemen Kehutanan
- 6 Inovasi Agroforestri untuk Meningkatkan Produktifitas Karet
- 8 Pendekatan *Bottom-up* dalam Menghitung Biaya untuk Menurunkan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi
- 9 Memetakan Konflik dengan RaTA
- 11 Mengenal Dr Ujjwal P. Pradhan



Foto: Aunul Fauzi

“Bahkan tidak sedikit petani yang belum terbiasa dengan manfaat pemangkasan (*pruning*) dan penjarangan (*thinning*) terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas kayu jati mereka,” jelas Gerhard yang berada di Wonosari tanggal 8-14 September 2008 lalu untuk memilih demoplot penelitian bersama rekan peneliti lainnya. “Kurangnya pengetahuan, informasi, dan modal kerja menjadi penghambat bagi petani dalam menerapkan usahatani jati yang tepat.”

Keterbatasan akses pasar merupakan permasalahan umum yang dihadapi petani kecil, termasuk petani jati di Gunung Kidul. Minimnya informasi mengenai standar kualitas kayu dan harga masih menjadi masalah utama. Hal ini diungkapkan Iwan Kurniawan dari ICRAF yang memimpin penelitian aspek pemasaran jati dalam penelitian yang sama. Iwan menjelaskan bahwa sebagian besar petani belum berorientasi pasar dalam mengelola agroforestri jati. Kemampuan negosiasi harga juga masih lemah sehingga seringkali petani terpaksa menerima harga jual kayu jati yang rendah.

“Untuk memberi gambaran tentang pengelolaan usaha tani jati yang baik, kami mengajak petani dan pedagang kayu jati Gunung Kidul berkunjung ke perusahaan pemrosesan jati di Jepara dan Perum Perhutani Cepu di Jawa Tengah. Kami juga telah mengajak mereka mengunjungi lokasi pembibitan di Kawasan Hutan Penelitian Bunder-Playen dan komunitas petani jati di Karangasem yang masih berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Bulan April lalu, kami juga mengadakan pelatihan selama 3 hari bagi para petani mengenai aspek legal penebangan dan penjualan kayu jati,” papar Iwan.

## Berubah ... Kenapa Tidak?

### Satu aspek dalam penelitian aksi

*“Pagi ini kita sudah harus sepakat tentang kriterianya. Kalau tidak, akan mengalami kesulitan di lapangan,” tegas Gerhard di hadapan tim peneliti, pagi tanggal 8 September 2008 lalu.*

Hari pertama kedatangan tim peneliti di Gunung Kidul diisi dengan diskusi kriteria pemilihan lahan untuk dijadikan demoplot penelitian pengaruh intensitas pemangkasan dan penjarangan terhadap pertumbuhan, produksi dan kualitas kayu jati. Praktik silvikultur agroforestri jati di daerah penelitian memang sangat beragam. Pengaturan jarak tanam dan pemeliharaan cenderung belum mengikuti pola yang dianjurkan. Tim peneliti perlu cermat dalam menentukan kriteria pemilihan lahan demoplot agar tetap memenuhi kaidah metodologi penelitian.

Jarum jam di Wisma Joglo Samiaji, Wonosari, sudah menunjukkan tepat pukul 11.30 siang. Bukannya

menemukan kesepakatan, diskusi malah memunculkan berbagai pertanyaan baru.

“Kalau begitu, kita langsung ke lapangan. Kita perlu melihat langsung kondisi lahan petani yang sebenarnya. Hasil pengamatan siang ini akan kita diskusikan nanti malam,” kata Gerhard mengakhiri diskusi seraya mengingatkan anggota tim akan sempitnya waktu yang tersedia. Mereka memang sedang berpacu dengan waktu. Target kunjungan lapangan yang direncanakan sampai tanggal 14 September adalah terpilihnya 6 demoplot penelitian dan ditandatangani kesepakatan dengan para petani pemilik lahan. Untuk mencapai target tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.

Tim peneliti gabungan dari berbagai lembaga penelitian tersebut segera berkemas menuju Dukuh Sumber, Desa Candirejo, yang termasuk wilayah Kecamatan Semin, satu dari 7 kecamatan di lokasi penelitian. Dua kendaraan niaga yang mereka sewa segera meninggalkan penginapan menerobos siang yang panas.

Setengah hari ternyata tidak cukup untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Pada hari kedua dan ketiga, tim harus kembali ke beberapa lokasi penelitian lain yang berjarak antara 1 sampai 1,5 jam ke arah utara dan selatan kota kabupaten tempat mereka menginap. Kenyataan bahwa jati umumnya ditanam di pinggir sebagai batas lahan membuat tim kesulitan

Kendala regulasi yang menghambat perkembangan pasar jati rakyat juga mendapat perhatian dalam pelatihan tersebut. Philip dari CIFOR yang terlibat dalam penelitian aspek kebijakan dari ACIAR Teak Project, menyayangkan keharusan petani kecil mengikuti regulasi yang sebenarnya diperuntukkan bagi perkebunan besar.

“Petani diharuskan menyiapkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Pada prakteknya, petani sering menyerahkan urusan perijinan ini kepada pedagang kayu dan terpaksa membayar biaya yang tidak kecil. Mestinya, cukup dengan SIT (Surat Ijin Tebang) yang dikeluarkan Kepala Desa, petani sudah bisa menjual hasil kebunnya dengan bebas,” jelas Philip sembari mengatakan bahwa praktek semacam itu mengurangi pendapatan petani.

“Karena itulah, diperlukan pendekatan multi-pihak dalam usaha mengembangkan agroforestri jati di wilayah Gunung Kidul dan Indonesia pada umumnya supaya semua aspek pengembangan agroforestri jati akan dapat ditangani,” ujar Pak Jim yang menjadi koordinator peneliti ICRAF/Winrock International untuk kedua bidang penelitian, yaitu budidaya dan pemasaran jati.

“Dalam penelitian ini, kami menyatukan semua keahlian dari berbagai lembaga yang berpartisipasi. Masing-masing berperan sesuai dengan bidangnya dan bersifat saling mengisi. Dan yang paling penting, dampak penelitian dan usaha pengembangan agroforestri jati yang kami lakukan di Gunungkidul akan dapat dirasakan secara lebih nyata dan luas – baik untuk kepentingan keilmuan maupun penerapan di lapangan oleh masyarakat tani”. [AF/IK]



Foto: Aunul Fauzi

menemukan lahan jadi dalam bentuk petak (*block planting*) untuk dijadikan blok penelitian. Di beberapa tempat, petani bahkan sudah pernah melakukan pemangkasan sehingga pohon jatinya tidak bisa dijadikan kontrol. Di samping itu, usia tanam dan diameter pohon kadang sudah melebihi batas optimal yang diperlukan untuk penelitian. Hal baru yang ditemukan pada saat kunjungan lapangan antara lain dominannya trubusan di suatu hamparan.

Pak Jim menjelaskan, “Di daerah selatan Gunung Kidul dengan karakteristik permukaan lahan berbatu dan kerapatan tanam rendah, penjarangan tanaman mungkin bukan opsi terbaik. Ada banyak trubusan yang dibiarkan tumbuh. Ini dapat dimengerti karena petani kesulitan menemukan lubang tanam dengan kedalaman tanah (*solum*) yang cukup untuk pertumbuhan jati.”

Pak Jim bahkan mengusulkan agar penelitian di daerah selatan

diarahkan untuk mengetahui efektifitas pengurangan trubusan (*singling*) terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas jati. Rancangan penelitian harus dirubah. Hal ini ternyata bukan menjadi kendala karena sudah diantisipasi pada saat proposal penelitian dikembangkan, mengingat sifat penelitian aksi (*action research*) yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Denta Anggakusuma, analis statistik ICRAF yang bertanggungjawab menganalisa data, membenarkan. “Pada dasarnya alat-alat statistik diciptakan untuk mengakomodir setiap perubahan dalam rancangan penelitian. Hanya saja, dengan bertambahnya variabel penelitian, maka diperlukan alat statistik lainnya.”

“Untuk mengetahui kombinasi pemangkasan dan penjarangan terbaik, kami menggunakan rancangan faktorial. Tetapi dengan adanya perubahan fokus penelitian

di daerah selatan hanya pada trubusan, maka kami akan menggunakan rancangan kelompok acak lengkap (*completely randomized block design*) untuk bisa menghasilkan rekomendasi penelitian yang diharapkan,” jelas Denta ringan.

“Penelitian aksi memang sangat sesuai dengan kebutuhan kami,” imbuh Gerhard yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan S3 di Australian National University – Australia. “Penelitian aksi memberi kesempatan kepada petani untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian. Interaksi intensif antara kami sebagai wakil dari lembaga penelitian dengan para petani sebagai aktor utama kegiatan agroforestri di lapangan juga akan terbangun secara baik. Ini akan memudahkan adopsi hasil-hasil penelitian oleh petani bila kelak penelitian sudah selesai.” [AF/IK]



Foto: Aunul Fauzi

# Tebang Jati Bayar Semesteran

“Saya tidak menjual dalam bentuk gelondongan. Kayu jati saya rajang dulu menjadi balok atau papan, baru saya jual. Ini namanya meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, saya bisa memperoleh harga yang lebih baik,” jelas Subardi (58 tahun) tentang balok dan papan kayu jati yang ditumpuk di halaman dan disandarkan di dinding depan rumahnya.

Bersama istri dan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, Subardi tinggal di Dusun Temon, Desa Giripurwo. Desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Di Yogyakarta. Sepertiga lahan agroforestri jati miliknya Subardi terpilih sebagai salah satu plot penelitian pemangkasan dan penjarangan jati.

“Awalnya, yang menanam jati di kebun adalah ayah saya, Mbah Marto. Beliau rajin menyemaikan bibit jati yang dipungutnya dari hutan jati di perbukitan selatan. Sejak saat itu, petani di dusun kami mulai mengikuti langkah tersebut.

Di sela-sela tanaman jati, petani masih bisa menanam palawija seperti padi, kedelai, kacang, dan singkong untuk keperluan sehari-hari. Tanaman palawija merupakan sumber pangan dan pendapatan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar rumah tangga. Di samping itu, mereka mengembangkan dan memelihara

*Data yang dikumpulkan dalam survei rumah tangga terhadap petani jati Gunungkidul pada bulan Juni-September 2007 menunjukkan bahwa 80% petani menanam jati sejak lebih dari 10 tahun yang lalu.*

*Tujuan petani menanam jati terutama adalah sebagai tabungan/warisan keluarga (39% responden), sumber uang tunai yang cepat pada kondisi darurat (21%) dan biaya sekolah (10%).*

ternak seperti ayam, sapi dan kambing yang digunakan sebagai sumber uang tunai jika pendapatan dari palawija tidak mencukupi.

“Kita juga biasa menanam pohon kayu lainnya seperti sengon laut, akasia, melinjo, dan nangka” terang Subardi tentang sistem agroforestri jati yang banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan para petani lain di Gunung Kidul.

Subardi boleh berbangga. Dia termasuk tiga dari 130 kepala

keluarga di dusunnya yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Kedua anak laki-laki Subardi saat ini kuliah di Yogyakarta. Dadang (20 tahun) di Universitas Muhammadiyah dan Puput (18 tahun) di Universitas Ahmad Dahlan. Subardi memang bekerja 2 hari dalam seminggu sebagai staf bagian umum di salah satu instansi kesehatan di Yogyakarta, namun dia mengaku gajinya tidak seberapa. Untuk membayar uang kuliah kedua anaknya, Subardi mengandalkan pohon jati.

“Saya sangat bersyukur bisa menyekolahkan mereka. Bagi saya pendidikan adalah hal utama yang bisa saya wariskan. Walau berat biayanya, saya masih tetap bisa mengatasinya dengan jati,” ujar Subardi tersenyum. [AF]

**Informasi**

Iwan Kurniawan  
Telp: 0251 8625415 ext. 798  
Email: k.iwan@cgiar.org



FALLOW:

## Model Simulasi Dinamika Proses Perubahan Bentang Lahan

“Bila nilai ekonomi naik sekitar 10% maka terjadi penurunan nilai ekologis sebanyak 20%. Artinya, ekonomi yang membaik ternyata diikuti kerusakan ekologis,” ucap Muhdarsyah mengakhiri presentasi kelompoknya tentang strategi pengembangan wilayah Arongan Lambalek, Aceh Barat.

Beserta 14 orang rekannya dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Aceh Barat seperti Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tata Ruang dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KPPKP Aceh Barat, serta dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Muhdarsyah terlibat diskusi perencanaan wilayah dalam sesi akhir Training Analisis Perubahan Bentang Lahan sebagai Dasar Perencanaan Wilayah dengan memanfaatkan aplikasi Model FALLOW yang diselenggarakan di Meulaboh, Aceh Barat.

Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 13-17 Oktober 2008 lalu merupakan kerjasama Bappeda Aceh Barat dan ICRAF melalui Proyek

*Rebuilding the Green Infrastructure with Trees People Want (ReGrIn).*

Desi Suyanto dan Rachmat Mulia, dua peneliti ICRAF yang menjadi narasumber pelatihan, mengatakan bahwa FALLOW merupakan model simulasi yang dibangun sebagai alat bantu melakukan prospeksi atau pandangan ke depan terhadap berbagai kemungkinan dampak dari implementasi suatu strategi pembangunan dalam suatu wilayah pedesaan agraris.

FALLOW menempatkan masyarakat petani di suatu wilayah sebagai faktor utama, karena merekalah yang langsung membuat keputusan penting terkait alokasi sumberdaya lahan, finansial, tenaga kerja, sekaligus memilih beragam investasi berbasis lahan yang tersedia di wilayahnya.



Foto: Aulia Firdaus, Suyitno, dan Janudianto

“Harapan saya peserta pelatihan mampu mengoptimalkan keterampilannya dalam perencanaan lahan” ujar Wakil Bupati Aceh Barat ketika membuka pelatihan.

“Semoga FALLOW bisa dimanfaatkan secara optimal oleh peserta setelah selesai mengikuti pelatihan.” tambahnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh salah seorang peserta pelatihan, Jamal Mirda, dari Bappeda Aceh Barat. “Saya berharap ilmu dari pelatihan ini dapat membantu kami dalam pengelolaan tata ruang di wilayah kami.” [JD/AF]

### Informasi

Janudianto

Telp: 0251 8625415 ext. 757

Email: janudianto@cgiar.org



### Forum Reboan

## Ajang Diskusi dan Silaturahmi di Departemen Kehutanan

Jarum jam sudah menunjukkan pukul 07.30. Beberapa staf tampak sibuk menyiapkan Ruang Rapat Utama Blok 1 Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti yang menjadi tempat pelaksanaan Forum Reboan. Hari ini, 3 September 2008, Reboan menghadirkan dua pembicara dari World Agroforestry Centre (ICRAF), Dr Meine van Noordwijk dan Dr Jess Fernandez.

“Reboan adalah acara internal bagi para pejabat Eselon II untuk mendiskusikan topik-topik yang berkaitan dengan tugas pokok departemen. Tetapi lembaga mitra seperti ICRAF juga bisa mengisi acara. Peserta dapat mengambil manfaat dari paparan topik-topik yang mungkin bukan termasuk bidang tugas sehari-hari,” tutur Ibu Indriastuti, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi yang menggagas Reboan tahun 2005 lalu. Ibu Indri mengatakan hasil diskusi Reboan biasanya dibawa ke dalam rapat bersama Menteri Kehutanan.

“Reboan juga dijadikan tempat silaturahmi antar peserta karena kesempatan bertemu tidak datang setiap hari,” ungkap Ibu Indri mengomentari beberapa peserta yang datang lebih awal agar memiliki waktu lebih banyak untuk bertukar cerita satu sama lain.

Retno Utaira, staf senior ICRAF yang bertanggung-jawab membina hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah mengatakan Reboan sangat bermanfaat bagi ICRAF sebagai tempat mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada para

pejabat Departemen Kehutanan. “Dari pertanyaan, komentar, dan tanggapan peserta, kami juga bisa mengetahui harapan mereka terhadap ICRAF.” [AF]

### Informasi

Ir. Indriastuti, MM

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi  
Gedung Manggala Wanabakti

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta.

Telp: 021 5730385



*Di Jambi, pembukaan lahan untuk kebun karet dengan pola tebas-tebang-bakar sudah menjadi tradisi. Lahan yang sudah bersih lalu ditanami secara tumpangsari, yaitu tanaman pangan dengan karet. Ketika tajuk karet mulai menaungi sehingga produksi tanaman pangan menurun, petani meninggalkan kebun karet mudanya tanpa pemeliharaan dan kembali lagi saat karet siap sadap. Karena lama tak terurus, produksi karet dari kebun tidak memuaskan.*

Foto: Laxman Joshi

## Inovasi Agroforestri untuk Meningkatkan Produktifitas Karet

*“Produksi karet rakyat di Kabupaten Bungo masih di bawah 600 kg/ha/tahun. Sebagai komoditas unggulan, ini tergolong rendah,” ungkap Ratna Akiefnawati, peneliti World Agroforestry Centre (ICRAF) yang berkantor di Jl. Tembesu 21, Muara Bungo, Jambi.*

Ratna menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya produksi adalah penggunaan bibit karet bermutu rendah. Sumber bibit biasanya berupa karet cabutan atau biji sapan (*seedling*). Pemeliharaan yang dilakukan juga sangat minim.

“Kalau berbicara tentang produksi karet rakyat, memang seperti itulah adanya. Tentu saja hasilnya masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan,” jelas Dr Laxman Joshi, peneliti ICRAF yang lama berkecimpung dalam penelitian sistem agroforestri karet di Jambi.

Di sisi lain, sistem agroforestri karet di Bungo ternyata memiliki aspek positif terutama berkaitan dengan tingginya tingkat keragaman hayati yang mendekati kondisi hutan sekunder. Penelitian yang dilakukan para peneliti ICRAF menunjukkan beberapa bukti.

Tahun 2006, penelitian Rasnovi di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo menunjukkan sebanyak 62,69% jenis anakan tumbuhan berkayu yang ditemukan beregenerasi di hutan juga ditemukan di agroforestri karet. Calestreme (2004), Prasetyo (2007), Hendarto (2007), dan Hariyanto (2007) menyimpulkan bahwa agroforestri karet dapat menampung 31 jenis mamalia yang menjadikan agroforestri karet sebagai penyedia sarang dan makanan, area migrasi, tempat hidup hewan langka. Di dalam agroforestri karet juga ditemukan 12 jenis kelelawar pemakan buah dan serangga, 6 jenis primata serta 46 jenis kumbang tinja yang dapat digunakan sebagai indikator agroforestri karet sebagai lingkungan yang menyerupai hutan.

Berangkat dari kenyataan rendahnya produksi karet serta perlunya penyelamatan ekosistem agroforestri karet yang kaya keragaman hayati,

maka pada tahun 1996, ICRAF memulai penelitian bersama CIRAD (organisasi Perancis dengan spesialisasi penelitian pertanian untuk pembangunan di daerah tropis dan sub-tropis), Balai Penelitian Sembawa - Pusat Penelitian Karet, dan beberapa universitas dalam maupun luar negeri.

“Kami berusaha memahami tradisi pemanfaatan lahan para petani. Ternyata tradisi tersebut banyak menyimpan kearifan lokal,” papar Laxman yang juga ahli dalam bidang etno-ekologis.

Berdasarkan pemahaman tersebut, ICRAF berusaha menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan produksi agroforestri karet, namun di sisi lain keragaman hayati tetap terjaga.

*Penelitian yang bertajuk Smallholder Rubber Agroforestry Project (SRAP) antara lain didanai oleh USAID (1996-1998) dan DFID (1998-2001). SRAP lalu dilanjutkan dengan Smallholder Rubber Agroforestry System (SRAS) yang didanai oleh Common Fund for Commodities (CFC) dan dipantau oleh International Rubber Study Group (IRSG) antara 2004-2008.*

Melalui SRAP dan SRAS, ICRAF memperoleh jawaban. Untuk meningkatkan produktifitas agroforestri karet, ICRAF memperkenalkan inovasi agroforestri karet yang dinamakan RAS 1, RAS 2, dan RAS 3. Ketiga inovasi tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman di lokasi-lokasi penelitian di Kabupaten Bungo - Jambi, Kabupaten Pasaman - Sumatera Barat, dan Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat.

“Hasil sadap karet dalam ketiga sistem RAS yang diperkenalkan tersebut berkisar antara 1100-1700 kg/ha/tahun. Kenyataan ini tentu saja menggembirakan bagi petani,” kata Ratna.

Dibandingkan dengan sistem penanaman karet monokultur, ketiga sistem RAS tidak memerlukan pengelolaan yang terlalu intensif. Hal ini memungkinkan tumbuhnya beragam tumbuhan yang berguna bagi konservasi fauna dan flora. Para petani juga mendapatkan keuntungan

tambahan dari hasil buah-buahan atau pohon kayu. Lingkungan agroforestri karet menjadi rumah tinggal alternatif bagi fauna yang mulai terancam punah karena kehancuran hutan alam, habitat hidup mereka.

Diharapkan bila nanti mekanisme imbal jasa atas pengurangan emisi karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi dilaksanakan, kemungkinan besar petani agroforestri karet juga akan memperoleh insentif tambahan.

“Saat ini saja, keberadaan demplot penelitian dan berbagai kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan ICRAF sudah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pengetahuan petani bertambah dan mereka tidak lagi ragu menanam karet unggul dengan sistem agroforestri,” tambah Ratna. [AF/RA/JD]

## Informasi

Ratna Akiefnawati  
Telp: (0747) 21150  
Email: Rakiefnawati@yahoo.com.sg

### RAS 1: Sistem Agroforestri Ekstensif

Merupakan sistem agroforestri ekstensif yang pengelolaannya setara dengan karet rakyat, dimana bahan tanam karet asal seedling diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder seperti sistem agroforestri. Produksi karet klonal tahun kedua pada RAS 1 berkisar antara 1200-1700 kg/ha/tahun

### RAS 2: Sistem Agroforestri Intensif

Merupakan sistem agroforestri kompleks dengan pengelolaan relatif intensif, dimana karet klonal ditanam secara tumpang-sari dengan tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman penghasil kayu. Produksi karet klonal tahun kedua dan ketiga pada RAS 2 berkisar antara 1100-1300 kg/ha/tahun

### RAS 3: Reklamasi Lahan Alang-alang

Merupakan sistem agroforestri kompleks yang dibangun untuk merehabilitasi lahan alang-alang dengan mengintegrasikan karet dengan jenis tanaman lain yang cepat tumbuh dan menutup permukaan tanah di antara barisan tanaman karet, sehingga pertumbuhan alang-alang terhambat. Tanaman pangan sebagai tumpang-sari hanya dilakukan pada tahun pertama kemudian diikuti dengan kombinasi penanaman kacang-kacangan penutup tanah dan pohon cepat tumbuh penghasil pulp. Produksi karet klonal tahun ketiga pada RAS 3 berkisar antara 1100-1300 kg/ha/tahun



Foto: Eric Penot, Budi, Sujono, Ratna Akiefnawati, Ilahang

## pojok publikasi

### Petunjuk Teknis: Penanaman Meranti di Kebun Karet

Oleh: Hesti L. Tata, Gede Wibawa dan Laxman Joshi (2008)

Teknik budidaya meranti telah dikenal di kalangan rimbawan dalam upaya rehabilitasi hutan dan pembangunan hutan tanaman. Namun, dengan berkurangnya areal hutan, maka penanaman meranti di lahan selain hutan (non hutan) menjadi sebuah tantangan. Salah satu areal non hutan yang potensial untuk pengembangan meranti adalah kebun karet. Kebun karet yang dikelola dengan sistem wanatani menjadi salah satu alternatif untuk menanam meranti, dengan tujuan pengayaan jenis dan pembangunan usaha kayu rakyat skala kecil. Walaupun meranti memiliki karakter bibit yang berbeda dengan karet, namun dapat ditanam bersama-sama dengan karet muda di lahan yang terbuka, maupun karet dewasa. Petani karet dapat menanam meranti di kebun karet, sehingga diharapkan selain memperoleh manfaat dari getah karet juga mendapat manfaat dari kayu meranti.

Dalam upaya mengembangkan tanaman meranti di dalam kebun wanatani karet maka disusun buku petunjuk teknis yang memberikan informasi mengenai pentingnya penanaman kayu meranti (Bab 1); penyebaran tempat tumbuh, pengenalan beberapa jenis meranti dan fisiologi benihnya (Bab 2); cara membangun persemaian dan pembibitan meranti dari biji dan stek pucuk (Bab 3) dan cara penanaman meranti mulai dari persiapan lahan, pengaturan jarak tanam hingga pemeliharaan bibit meranti (Bab 4).

Buku petunjuk teknis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bungo dan Tebo, Provinsi Jambi, dengan harapan dapat digunakan sebagai pegangan lapangan bagi praktisi, penyuluh, petani maupun khalayak yang ingin menanam meranti atau jenis-jenis Dipterokarpa lainnya di kebun karet. Dengan demikian, petani karet dapat melakukan usaha pembibitan mandiri atau berkelompok, dengan mencari bibit di sumber bibit atau di areal hutan dan pertanaman meranti di kebun karet.

#### INFORMASI :

Melinda Firds, telp 0251 8625415 ext. 756, email: [icrafseapub@cgiar.org](mailto:icrafseapub@cgiar.org); [www.worldagroforestry.org/af2/publications](http://www.worldagroforestry.org/af2/publications)



# Pendekatan *Bottom-up* dalam Menghitung Biaya untuk Menurunkan Emisi Karbon (*Abatement cost*) dari Deforestasi dan Degradasi

*Bagaimana mengukur emisi karbon yang ditimbulkan oleh konversi atau perubahan penggunaan lahan? Berapa jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer bila hutan di Jambi diubah menjadi perkebunan sawit atau karet? Bagaimana bila lahan gambut Kalimantan dikeringkan menjadi sawah? Apakah konversi hutan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan insentif yang dapat diperoleh dari mekanisme penjualan karbon internasional?*

Itulah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab para peneliti dari World Agroforestry Centre (ICRAF) melalui penghitungan emisi karbon dan penghitungan biaya untuk menurunkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation – REDD*) dengan pendekatan *bottom-up*.

“Sementara ini, berbagai batasan yang digunakan dalam negosiasi mengenai insentif atau kompensasi REDD ditentukan oleh negara-negara maju. Beragam praktek pemanfaatan lahan di lapangan tidak dipertimbangkan. Bahkan dalam wacana perdagangan karbon sekarang ini, kita terbiasa menggunakan perhitungan skala nasional, padahal level sub-nasional juga penting,” jelas Dr Sonya Dewi, peneliti ICRAF yang berkecimpung dalam penelitian mengenai penghitungan emisi karbon.

Menjawab persoalan yang dipaparkan Sonya, belakangan ini ICRAF bersama mitra kerjanya dalam penelitian ASB (*Alternatives to Slash and Burn*) gencar mengembangkan metode *bottom-up* yang mempertimbangkan sifat kondisionalitas dan realistis imbal jasa lingkungan.

Kondisionalitas artinya mekanisme penghitungan emisi karbon dalam mekanisme REDD harus mencakup semua jenis pemanfaatan lahan yaitu lahan pertanian, hutan, dan lahan lainnya atau yang dikenal dengan AFOLU (*Agriculture, Forest, and Other Land Use systems*).

“Salah satu perdebatan hangat yang terjadi saat ini adalah menyangkut definisi kawasan yang dianggap bisa masuk dalam mekanisme REDD. Apakah hanya hutan saja yang bisa masuk? Hutan seperti apakah? Dengan pohon dan tutupan lahan seperti apa? Bagaimana dengan kebun yang dikelola petani? Atau perkebunan sawit atau karet dalam

sekala besar? Lalu status kawasan gambut tak berpohon bagaimana?” kata Dr Meine van Noordwijk, peneliti senior ICRAF.

Tentang sifat realistis, Sonya menjelaskan, “Kami juga menghitung nilai kesempatan yang hilang (*opportunity cost*). Ini penting untuk melihat apakah mekanisme REDD menarik untuk diterapkan. Kalau ternyata *opportunity cost*-nya tinggi, secara realistis masyarakat sebagai penjual jasa lingkungan tidak akan tertarik. Pihak pembeli jasa lingkungan juga tidak tertarik karena biaya untuk menurunkan emisi karbon (*abatement cost*) tinggi. Mekanisme REDD tidak akan laku!”

*Metode bottom-up sudah dicoba ICRAF di 3 provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Lampung, dan Kalimantan Timur. Data tutupan lahan tahun 1990 dibandingkan dengan tahun 2000 dan 2005. Ini dilakukan untuk mengetahui emisi karbon yang ditimbulkan karena konversi lahan. Secara umum bisa dikatakan bahwa lebih dari 80% emisi karbon akibat konversi atau perubahan lahan di ketiga provinsi tersebut memiliki nilai ekonomi yang rendah (di bawah US\$ 5), sehingga disimpulkan bahwa skema kompensasi dalam mekanisme REDD cukup menarik untuk ketiga provinsi tersebut.*

*“Logikanya, bila petani dan pemerintah di ketiga provinsi tersebut berhasil mencegah deforestasi dan degradasi, maka mereka akan memperoleh dana kompensasi karena hilangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan hutan dan lahan. Dana kompensasi ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber dana pembangunan,” jelas Sonya sembari mengingatkan masih diperlukannya usaha untuk menjawab berbagai isu seputar mekanisme REDD seperti kelembagaan yang mempersoalkan siapa yang berhak menerima dan bagaimana pendistribusian dana kompensasi.*

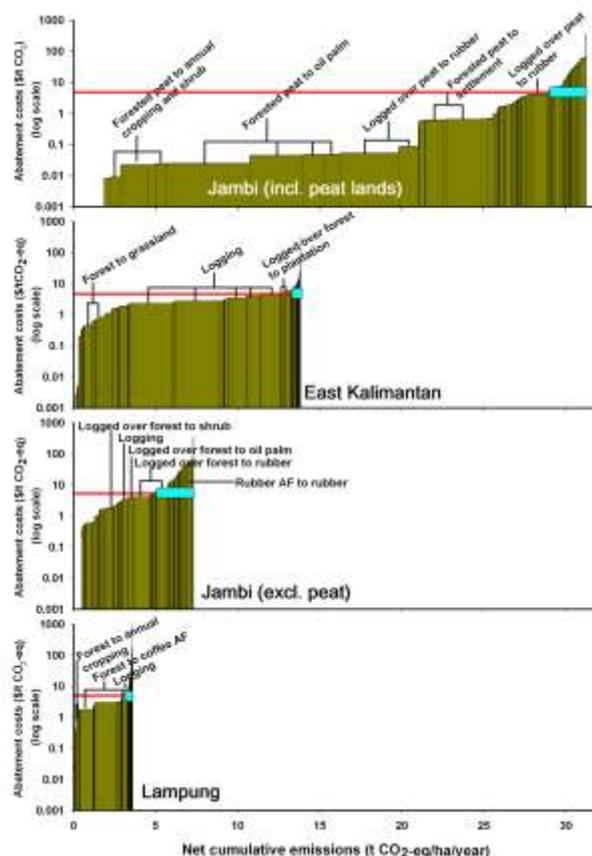
Sonya menegaskan penebangan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan karet dan sawit di Jambi tidak akan membawa keuntungan ekonomi yang tinggi. “Masih realistis untuk membiarkan lahan hutan gambut seperti apa adanya apabila masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dari REDD.”

REDD merupakan mekanisme internasional yang dibicarakan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 akhir tahun 2007 lalu di Bali. Negara berkembang dengan tutupan hutan tinggi selayaknya mendapatkan kompensasi apabila berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi dengan melakukan berbagai hal seperti mencegah pembalakan hutan, kebakaran hutan, hingga konversi hutan.

Masalahnya, sebelum dicapainya kesepakatan tentang REDD dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-14 di Poznan, Polandia akhir tahun ini, nampaknya negara-negara yang memiliki kapasitas menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi seperti Indonesia masih harus sabar menunggu.

Sonya berharap, pendekatan *bottom-up* dalam menghitung emisi karbon dan biaya menghindari emisi karbon yang dikembangkan dan dilakukan oleh para peneliti di ICRAF setidaknya akan menjadi bahan bagi para negosiator REDD di Poznan.

“Mudah-mudahan dengan kesepakatan yang dicapai di Poznan nanti, petani dan pemilik lahan di Indonesia bisa memperoleh kompensasi yang layak dan adil, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk melakukan konversi lahan yang menjerus ke arah deforestasi dan degradasi lahan. Dengan demikian emisi karbon bisa diturunkan dan pemanasan global bisa dikurangi lajunya,” kata Sonya. [AF/SD]



## Informasi

Sonya Dewi  
Telp: (0251) 8625415 ext. 749  
Email: s.dewi@cgiar.org

# Memetakan Konflik dengan RaTA

Tahun 2003, melalui Departemen Kehutanan, pemerintah menetapkan kawasan Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 hektar yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Penetapan ini didasarkan pada zonasi yang dilakukan pemerintah Belanda pada masa kolonial serta pemerintah Indonesia antara tahun 60an dan 80an. Penetapan sebuah kawasan sebagai taman nasional berarti selain yang berhak tidak diperbolehkan masuk apalagi memanfaatkan segala sesuatu yang berada di dalam lingkup kawasan.

Pematokan batas yang dilakukan oleh otoritas TNGHS menuai protes dari kalangan masyarakat adat yang berdiam di dalam maupun di sekitar kawasan yang dipatok. Mereka mengaku tetap berhak memanfaatkan kawasan karena hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan dijamin oleh adat mereka.

Protes juga dilayangkan Pemerintah Kabupaten Lebak karena merasa wilayah mereka seluas 15.000 hektar yang diperuntukkan bagi usaha tambang, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur lain, ternyata juga dianggap masuk kawasan TNGHS. Dasar klaim

Pemerintah Lebak adalah Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1961.

Beberapa anggota masyarakat di sekitar kawasan yang dipatok juga mengajukan keberatan karena merasa memiliki hak berdasarkan sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1960-an.

Klaim yang dilakukan TNGHS, masyarakat adat, anggota masyarakat setempat, dan Pemerintah Lebak bukanlah klaim yang tak berdasar. Masing-masing memiliki bukti hukum yang jelas dan lengkap. Lantas bagaimana?

Itulah sekelumit cerita mengenai konflik tenurial di kawasan Gunung Halimun-Salak yang berhasil diungkap melalui RaTA (*Rapid Tenure Appraisal*), sebuah metode identifikasi konflik kepemilikan lahan (tenurial) yang dikembangkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).

“Sebenarnya, yang lebih penting bukanlah apa yang berhasil diungkap, tetapi bagaimana proses pengungkapan itu sendiri. Apakah semua data pendukung masing-masing klaim sudah lengkap dikumpulkan, apakah semua pihak yang berkonflik sudah mengungkapkan semua yang ingin

mereka suarakan, dan bagaimana analisa pemangku kepentingan dilakukan,” jelas Gamma Galudra peneliti ICRAF yang bersama beberapa rekannya masih terus menyempurnakan metode RaTA, salah satunya di wilayah barat TNGHS dimana konflik klaim menunjukkan eskalasi yang besar.

RaTA dikembangkan dengan tujuan memperjelas klaim legal maupun historis yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam suatu kawasan. Asumsi dasar yang dipakai adalah kualitas negosiasi antar pihak-pihak yang bersengketa akan meningkat bila dilakukan berdasarkan informasi lengkap. Dengan sendirinya, kualitas resolusi konflik juga akan meningkat.

“Sebagai sebuah kerangka analisa, RaTA berfungsi sebagai petunjuk dalam menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh pembuat keputusan atau mediator dalam mengembangkan resolusi konflik, baik yang didasarkan pada kebijakan legal maupun adat,” tambah Gamma. Apa yang diungkap Gamma merupakan salah satu komponen penting dalam RaTA yaitu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam penelitian RaTA sebelumnya di wilayah konflik Gunung Halimun-Salak, ditemukan fakta bahwa hampir 70% sumber kehidupan masyarakat sekitar bergantung pada sumber daya yang berada di dalam kawasan taman nasional.

“Dapat dimengerti kalau masyarakat lokal memang sangat berkepentingan dalam mempertahankan klaimnya. Bila isu-isu semacam ini tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan konflik yang ada akan terus berkembang dan pada gilirannya akan memberi dampak negatif pada keragaman hayati di wilayah Gunung Halimun-Salak,” lanjut Gamma.

Kawasan Gunung Halimun-Salak memang sudah diakui sebagai salah satu kawasan di Pulau Jawa yang masih memiliki tingkat keragaman hayati tinggi serta fungsi-fungsi sosial dan ekologis yang sangat penting.

Gamma juga menuturkan bahwa konflik tenurial bersifat dinamis sehingga diperlukan kehati-hatian.

## Sepuluh sumber konflik tenurial:

1. Perubahan pemerintahan (adat, kolonial, kemerdekaan)
2. Status ganda (hukum pemerintah dan adat)
3. Batas lahan
4. Tumpang tindih penguasaan lahan
5. Kurangnya pengakuan terhadap hukum adat
6. Tidak adanya catatan status kepemilikan
7. Perluasan lahan pertanian
8. Ketimpangan ekonomi
9. Pengungsian
10. Adanya migrasi masuk

*Sumber: Pengalaman penerapan RaTA di berbagai wilayah di Indonesia (Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat)*

“Tanpa penyajian data yang baik maka konflik tidak akan berhasil terselesaikan secara tuntas. Dalam beberapa kasus, kesepakatan penyelesaian konflik yang sudah dicapai pada akhirnya dilanggar juga.”

Pengalaman ICRAF dengan RaTA di Gunung Halimun-Salak telah menginspirasi beberapa pihak untuk menciptakan opsi penyelesaian sengketa seperti Kampung dengan Tujuan Konservasi (KdTK) dan Model Kampung Konservasi (MKK). Walaupun kedua opsi tersebut dikembangkan oleh pihak yang berbeda, KdTK oleh RMI (Rimbawan Muda Indonesia) dan MKK oleh JICA (Kerjasama Jepang Indonesia), keduanya memiliki kesamaan yaitu upaya penyelesaian sengketa yang berbasis pada keakuratan data. Salah satu sumber datanya adalah hasil analisis RaTA.

“RaTA membantu semua pihak memahami aspek-aspek konflik yang mereka hadapi. Setelah informasi dibuka lengkap, semua suara didengarkan, maka meja negosiasi pun digelar untuk menentukan pilihan terbaik penyelesaian sengketa,” kata Gamma menjelaskan kontribusi RaTA dalam konflik tenurial di kawasan Gunung Halimun-Salak. [GG/AF]

## Informasi

Gamma Galudra  
Telp: 0251 8625415 ext. 730  
Email: g.galudra@cgiar.org



Foto: Gamma Galudra



# Mengenal Dr Ujjwal P. Pradhan

Regional Coordinator,  
World Agroforestry Centre  
(ICRAF Southeast Asia)

*Tiga belas tahun bekerja di Ford Foundation bukanlah waktu yang pendek bagi Dr. Ujjwal P. Pradhan, pria berkebangsaan Nepal yang akrab disapa Pak Ujjwal. Berbagai pengalaman telah ia peroleh selama bekerja sebagai Program Officer bidang Pengembangan dan Kebijakan Sumberdaya Air di New Delhi (6 tahun) dan sebagai Program Officer bidang Lingkungan dan Pembangunan di Jakarta (7 tahun). Awal Desember 2008 ini, Pak Ujjwal akan memulai aktifitas barunya sebagai Regional Coordinator ICRAF Asia Tenggara.*

*Pak Ujjwal memperoleh gelar doktor pada tahun 1989 dari Cornell University, Ithaca, New York dalam bidang Sosiologi Pembangunan dengan disertasi tentang "Hak milik dan intervensi negara dalam sistem irigasi di Nepal". Di sela-sela kesibukannya, ia masih menyisihkan waktunya untuk menjadi editor sebuah buku terbitan Sage Publication (2005) berjudul "Asian Irrigation in Transition: Responding to Challenges"*

## **Menurut Bapak, apakah sumbangan ICRAF bagi Indonesia Indonesia selama ini?**

ICRAF telah banyak melakukan penelitian agroforestri, merintis penerapan skema jasa lingkungan, dan mengenalkan berbagai pendekatan pengelolaan lahan serta pohon. Selain itu, upaya yang dilakukan ICRAF dalam mempromosikan sistem pendukung negosiasi untuk menyelesaikan konflik mengenai hak dan fungsi lahan, namun tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan patut dipuji. ICRAF juga menekankan pada pengembangan strategi agroforestri yang lebih baik bagi petani karet, kopi dan sistem tamanan kayu-kayuan. Dalam melaksanakan kegiatannya, ICRAF berhasil membangun kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat.

## **Apa kekuatan ICRAF dalam menjalankan misinya?**

Beberapa di antaranya adalah staff yang berdedikasi, penelitian ilmiah yang berkualitas dan didukung oleh kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian, serta perhatian dan dukungan dari Dewan Pengarah yang kompeten.

ICRAF beruntung memiliki banyak mitra kerja strategis dan terlibat dalam berbagai jejaring keilmuan maupun praktisi. ICRAF juga menjadi anggota konsorsium penelitian global di bidang pertanian CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) yang bemarkas di kantor pusat Bank Dunia, Washington. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota penyokong CGIAR. Ini semua memungkinkan terciptanya kerjasama di tingkat lokal, regional maupun

global guna mempertemukan berbagai kepentingan.

Prestasi yang telah teruji, serta keragaman isu dan luasnya cakupan geografis penelitian merupakan potensi besar bagi ICRAF untuk dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dalam bidang agroforestri dan pengelolaan lahan. Ini akan berguna dalam membantu memberikan jawaban bagi permasalahan pengentasan kemiskinan serta mempromosikan kesejahteraan pedesaan.

## **Bagaimana ICRAF dapat meningkatkan perannya?**

Melalui strategi barunya, ICRAF akan dapat memberikan sumbangan nyata dalam menyelaraskan prioritas dan realitas lokal dan global. Hasil-hasil penelitian mengenai dinamika dan kompleksitas agroforestri dapat menjadi solusi inovatif yang dapat menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, juga permasalahan efisiensi (reduksi emisi aktual dalam konteks pemanasan global) dan kesetaraan (pengurangan kemiskinan dan keseimbangan lingkungan), atau antara perspektif ekonomis dan sosial politis.

ICRAF perlu lebih menyetengahkan pengetahuan dan penelitian ilmiah untuk memajukan peran agroforestri dalam mengurangi dampak-dampak emisi gas rumah kaca.

## **Tanggapan mengenai dikotomi penelitian dan pembangunan?**

Satu sama lain merupakan bagian yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal dan penelitian berbasis ilmiah dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu,



Dari kanan ke kiri: Dr Dennis P. Garrity, ICRAF-SEA Regional Coordinator I (1993-2002), Dr Meine van Noordwijk, Regional Coordinator II (2002-2008), dan Dr Ujjwal P. Pradhan, Regional Coordinator III (mulai 1 Desember 2008)

penelitian hendaklah bersifat responsif terhadap kebutuhan lokal dan global, namun tidak bersifat ekstraktif, yang artinya bahwa penelitian seharusnya dilakukan secara konsultatif dengan masyarakat, lalu hasilnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang terlibat.

ICRAF dikenal sebagai lembaga penelitian, namun hingga saat ini juga terlibat dalam penelitian yang mendukung kegiatan pembangunan. Saya pikir ini merupakan sebuah keseimbangan yang baik.

### Tentang kerjasama dengan mitra?

ICRAF harus membangun kemitraan timbal balik dan saling menghargai yang didasari rasa saling mempercayai dan menghormati. Tidak ada satupun organisasi yang mampu melakukan segala hal. Karenanya, penting bagi kita untuk mencari mitra yang dapat melengkapi untuk mewujudkan tujuan bersama. Saya berharap untuk dapat segera bekerja dengan pemerintah untuk penelitian bersama dalam pengelolaan dan pembaharuan agroforestri yang berkelanjutan.

### Fase ICRAF selanjutnya?

Melakukan konsolidasi mengenai berbagai pekerjaan yang telah dilakukan, menerjemahkan hasil-hasil penelitian untuk publik dan mendorong komunikasi publik, melanjutkan kerja lintas disiplin dan menfokuskan perhatian pada isu-isu pengentasan kemiskinan, pengelolaan agroforestri, kesetaraan, serta implikasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

ICRAF perlu mengembangkan kepemimpinan interdisipliner baru dalam bidang agroforestri di tingkat regional serta mempromosikan relevansinya di tingkat global sebagaimana telah dinyatakan pada strategi ICRAF yang baru. ICRAF harus melanjutkan usaha mengaitkan pengetahuan dan tindakan, utamanya untuk mengentaskan kemiskinan, dan memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam interaksi pemerintah dan masyarakat di tingkat nasional, regional dan global.

Saya berharap ICRAF menjadi tempat untuk mencari informasi dan metodologi agroforestri yang memberikan pemahaman akan interaksi manusia dan ekosistem. Sebuah tempat yang mendukung dan menyuburkan diskusi untuk pencarian solusi intelektual dan praktis dalam bidang agroforestri.

Pendek kata, ICRAF haruslah menjadi tempat di mana kita dapat mempertanyakan asumsi-asumsi kita, sekaligus mempertanyakan setiap jawaban yang ada.

# agenda



## Kongres Agroforestri Dunia yang Kedua

### The Future of Land-Use

23-28 Agustus 2009, Nairobi, Kenya

Sejak akhir tahun 1970, penelitian agroforestri sudah mulai meraih perhatian dunia. Saat ini, agroforestri muncul sebagai satu pilihan sistem pengelolaan lahan berkelanjutan.

Potensi agroforestri untuk mewujudkan tujuan-tujuan global, seperti Tujuan Pembangunan Milenium, juga banyak menarik perhatian ilmuwan dan para pembuat keputusan.

Kerjasama berbagai lembaga agroforestri dengan lembaga konservasi keanekaragaman hayati terjalin berdasarkan kekhasan masing-masing dalam menjawab persoalan perlindungan keanekaragaman hayati dunia.

Kongres Agroforestri Dunia yang Kedua diselenggarakan di tengah makin luasnya pengakuan peran agroforestri dalam menjawab persoalan global.

Informasi selengkapnya:

Website: [www.worldagroforestry.org/wca2009/](http://www.worldagroforestry.org/wca2009/)

Email: [wca2009@cgiar.org](mailto:wca2009@cgiar.org)

### Redaksional

#### Kontributor

Aunul Fauzi  
Janudianto  
Ratna Akiefnawati  
Sonya Dewi  
Iwan Kurniawan  
Gamma Galudra

#### Editor

Subekti Rahayu  
Aunul Fauzi

### Desain dan Tata Letak

Josef Arinto

### Desain Template

Vidya Vitrian

### World Agroforestry Centre ICRAF Southeast Asia Regional Office

Jl. CIFOR, Situ Gede  
Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia  
☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416  
✉ [icraf-indonesia@cgiar.org](mailto:icraf-indonesia@cgiar.org)

**Agroforestri** adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

[www.worldagroforestry.org/sea](http://www.worldagroforestry.org/sea)

